

ABSTRAK

Negara Indonesia yang dikenal dengan negara hukum, menjatuhkan sanksi pidana kepada setiap warga negaranya yang telah terbukti melakukan tindak pidana serta wajib menjalani hukumannya. Namun hukum pidana yang dijatuhkan selain merupakan upaya pembinaan terhadap mental dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan menjalani hukuman tersebut dan diberikan hak – haknya sesuai dengan konstitusi.

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana ada beberapa bentuk yang diberikan kepada narapidana, termasuk salah satunya adalah memberikan pembebasan bersyarat.

Adapun ketentuan hukum dimaksud adalah apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari hukumannya atau sekurang – kurangnya sembilan bulan dari hukuman pokoknya. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sebagai tempat dilaksanakan hukuman yang dijalani oleh narapidana dalam rangka memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang apakah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana telah sesuai menurut peraturan dan undang – undang yang berlaku di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wanita Tangerang. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan memakai metode deskriptif yakni melakukan penelitian dengan cara menggambarkan semua permasalahan dan menganalisa dengan data sekunder yang telah diperoleh.

Setelah dilakukan pembebasan bersyarat analisa terhadap data – data maupun hasil wawancara yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tangerang menyangkut persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku.